

**Perebutan Panggadereng di Kerajaan Lokal di Jazirah Sulawesi Selatan
Abad XV-XVII**

Bahri

Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, UNM
email:bahrisejarah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perebutan Panggadereng di Kerajaan Lokal, Sulawesi Selatan abad XV-XVII. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone adalah dua kekuatan yang sangat berpengaruh dalam konstalasi politik di jazirah Sulawesi Selatan pada masa kerajaan. Perebutan kekuasaan diantara dua kerajaan tersebut bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin di Kerajaan Gowa dan pemerintahan Arung Palakka di Kerajaan Bone, tapi jauh sebelumnya kedua kerajaan ini sudah terlibat dalam perebutan *panggadereng* di wilayah tersebut. Hal tersebut berlangsung hingga pasca perjanjian Bongaya yang juga sudah melibatkan VOC dalam pertentangan itu.

Kata Kunci: Perebutan kekuasaan, Kerajaan Lokal, Sulawesi Selatan.

Abstract

This study aims to determine the history of the struggle for Panggadereng in United Local, South Sulawesi XV-XVII century. The method that the researchers used in the writing of this history is a research method according Kuntowijoyo. The stages of historical research by Kuntowijoyo has five stages, the selection of topics, heuristics, verification, interpretation, and writing. Gowa and Bone kingdom are two forces that are very influential in the political constellation in Jazirah South Sulawesi in the kingdom. The power struggle between the two kingdoms not only occur during the reign of Sultan Hasanuddin in Gowa and reign in the kingdom Palakka White Bone, but long before the two kingdoms have been involved in the struggle *panggadereng* in the region. This lasted until after the treaty of bongaja which has also been involved in a contradiction that VOCs.

Keywords: Power struggle, Local Kingdom, South Sulawesi.

Pendahuluan

Dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, maka masing-masing kerajaan melakukan persekutuan sebagai upaya untuk memperkuat ikatan diplomasi dalam rangka menghindari hegemoni kekuasaan kerajaan lain. Persekutuan-persekutuan politik yang pernah diantara kerajaan-kerajaan di Jazirah Sulawesi Selatan, seperti Perjanjian *Tellumpoccoe* yang melibatkan Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Persekutuan *Tellu Limpoe* yang terjadi antara Kerajaan Bulu-Bulu, Tondong dan Lamatti. dan Persekutuan *Limae Ajattappareng* yang mencakup Sawitto, Suppa, Alitta, Sidenreng dan Rappang serta berbagai persekutuan atau perjanjian yang tercipta antara Kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Upaya persekutuan dengan cara perjanjian persaudaraan, bagi masing-masing kerajaan memiliki keuntungan tersendiri baik bagi kerajaan yang dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar ataupun kerajaan yang kecil atau dengan kata lain persekutuan yang simbiotis.

Dalam hal persekutuan masing-masing kerajaan memiliki patron. Patron tersebut dianggap sebagai kekuatan yang dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan. Sekitar Abad XV-XVI di kawasan ini terdapat dua kerajaan dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Kedua kerajaan tersebut saling berebut pengaruh dan berusaha tampil sebagai kekuatan yang unggul yang kemudian berusaha mencitrakan dirinya bahwa baik Kerajaan Bone ataupun Kerajaan Gowa merupakan patron utama dalam hal kekuasaan ataupun *pangaddereng* di jazirah Sulawesi ini. Kerajaan Bone menjadi patron *pangadderengTana' Ugi* (negeri-negeri Bugis), dan Kerajaan Gowa menjadi patron *pangadderengButta Mangkasara* (negeri-negeri orang Makassar), maka terjadilah persaingan terus menerus dalam abad XV-XVI, dengan cara memperluas wilayah kekuasaan masing-masing (Mattulada, 1998: 92). Bahkan persaingan ini berlanjut sampai pada abad XVII. Tepatnya di abad XVII inilah kemudian terjadi perubahan drastis di jazirah ini dan yang kemudian melahirkan suatu keadaan yang membedakan dengan keadaan sebelumnya dengan tokoh utamanya adalah Latenritatta Arung Palakka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 91).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerajaan Bone sebelum Arung Palakka

Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang saling berebut kekuasaan dengan rival utamanya adalah Kerajaan Gowa. Kerajaan Bone sebagaimana dengan kerajaan lokal lainnya di kawasan Sulawesi Selatan ini, diawali dengan adanya *To Manurung*. *To Manurung* di Kerajaan Bone dikenal

dengan *To Manurung ri Matajang*, dimana sebelum kedatangan *To Manurung* ini keadaan negeri mengalami kekacauan. Setidaknya ada tujuh negeri atau *wanua* yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Tana' Bone yakni Wanua Ujung, Tibojong, Ta', Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Pongceng dan Macege (Patunru, 1989, 11-12 dan Pangerang, 2009: 97). Perlu pula ditekankan bahwa sebelum Kerajaan Bone terbentuk hasil dari persekutuan dari ketujuh wanua tersebut, telah ada Kerajaan-kerajaan kecil yang lebih tua yakni, Kerajaan Awangpone, Kerajaan Pattiro, Kerajaan Cina, Kerajaan Palakka (Ali, 1969: 4).

Dari ketujuh Wanua Ujung, Pongceng, Ta' Tibojong, Tanete Riattang, Macege, dan Tanete Riawang tersebut lah yang kemudian seiring perkembangan zaman akhirnya wilayah Kerajaan Bone semakin bertambah baik karena penaklukan ataupun karena kesukarelaan untuk bergabung. Memasuki era abad XVI dan awal abad XVII terjadi dinamika keadaan di Kerajaan Bone. Perang dan intrik antar kerajaan tetangga, proses perdamaian, proses mencari sekutu sampai dengan proses islamisasi. Kerajaan Bone sendiri berhasil diislamkan pada tahun 1611. Setelah sebelumnya Kerajaan Wajo pada tahun 1610, Soppeng dan Sidenreng pada tahun 1609 (Pelras, 2006: 61). Kerajaan Bone dalam kurun waktu abad XVI mampu menjadi salah satu kerajaan yang kuat dan berpengaruh serta disegani didaerah ini khususnya di daerah timur Sulawesi Selatan, hal tersebut dipertegas dengan luasnya daerah kekuasaan, kemudian didukung dengan letaknya yang strategis. Hal tersebut diraih sejak pemerintahan Raja Bone V, La Tenrisukki Mappajungnge yang memerintah pada tahun 1508-1535, Raja Bone VI La Ulio Bote'E pada tahun 1535-1560 serta Raja Bone VII, La Tenrirawe Bongkang'nge pada tahun 1560- 1578 (Mattulada, 1989: 121-123)

Dimasa La Tenrisukki Mappajungnge melakukan usaha perluasan wilayah dengan cara peperangan dan penaklukan, salah satu yang monumental adalah mengalahkan pasukan Luwu dalam Perang Cenrana (1509) yang kemudian diakhiri Perjanjian perdamaian *Polo' Malelae ri Unnyi* (Mattulada, 1989: 121). Perjanjian ini menandai berakhirnya supremasi Luwu atas kerajaan-kerajaan Bugis lainnya di Sulawesi Selatan (Gibson. 2009: 199). Sementara pada masa pemerintahan La Ulio Bote'E, Kerajaan Bone giat meningkatkan konsolidasi internal dalam rangka memelihara dan memperkuat kekompakan serta mempertinggi semangat juang pasukan Kerajaan Bone (Patunru, 1989: 38). Dimasa raja ini, terjadi perjanjian antara Kerajaan Bone dengan pihak Kerajaan Gowa yang diwakili oleh Raja Gowa IX Tu Maparrisi Kallonna yang dikenal dengan Perjanjian *Tamalate* yang juga disebut "*Sitettongenna Sudangae Lateariduni*" (Hafid, 1989: 25).

Kerajaan Bone semakin menguatkan kedudukannya pada masa raja berikutnya La Tenrirawe Bongkangnge. Pada masa ini pecah perang dengan Kerajaan Gowa yang dipimpin IMario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (Raja Gowa X) dan saudaranya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (Raja Gowa XI). Perang yang berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun ini diakhiri dengan Perjanjian *Caleppa*. Perjanjian ini memberikan keuntungan bagi Kerajaan Bone karena sebelumnya wilayah yang berada dibawah pengaruh Kerajaan Gowa beralih dibawah kendali Kerajaan Bone (Mattulada, 1989: 122). Selain dari perjanjian dengan Kerajaan

Gowa tersebut, juga tercipta Persekutuan *Tellumpoccoe*, yang melibatkan Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng. Latenrirawe pun berhasil menyokong terbentuknya Persekutuan *Tellu Limpoe*, antara Kerajaan Bulu-Bulu, Tondong dan Lamatti. Aliansi dari masing-masing persekutuan tersebut merupakan wujud konsolidasi Kerajaan Bugis menciptakan kemerdekaan, kedaulatan dalam negerinya dan menentang penaklukan kerajaan lain.

Kerajaan Bone yang mula berdirinya pada abad XIV sampai abad XVI telah menunjukkan dirinya sebagai kerajaan yang cenderung memperluas dan mempermantap kekuasaannya, kini memasuki dekade awal abad XVII posisi dan keadaan tersebut berbalik, mengalami perubahan drastis. Dari kerajaan merdeka, berdaulat dan patron bagi sebagian kerajaan lain kini beralih menjadi kerajaan yang terjajah bahkan menjadi budak bagi kerajaan terbesar di Jazirah Sulawesi ini yakni Kerajaan Gowa. Kemenangan Gowa atas Bone menjadikan Gowa sebagai satu-satunya penguasa terkuat di Sulawesi Selatan (Koro, 2006: 90).

Hegemoni Kerajaan Gowa

Kerajaan Gowa sebagai kekuatan politik terbesar di Sulawesi Selatan bahkan sebagai pemegang hegemoni di kawasan Indonesia Timur. Kemuculan Gowa sebagai kekuatan politik sudah mulai dirintis pada awal Abad XVI sejak pemerintahan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu Maparisi Kallonna (1510-1546). Pada zaman kekuasaan Raja Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu-Mapa'risi Kallonna, tercapai banyak kemajuan dalam lapangan politik, ekonomi dan kekuatan peperangan, termasuk pendirian benteng-benteng pertahanan di Pantai Makassar. Dengan kekuatan itu, dilaksanakan kegiatan yang lebih effensif lebih daripada sebelumnya. Ditaklukkannya negerinegeri Garassi, Katingang, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lembangan (Bantaeng), Bulukumba, Selayar, Panaikang, Mandalle', Campa, Marusu', dan Polombangkeng (Mattulada, 1989: 96).

Raja Gowa IX juga berhasil menyatukan Kerajaan Gowa dan Tallo dengan ikrar bersama bahwa Raja Tallo menjadi Karaeng Tu Mabbicara Butta atau mangkubumi (Perdana Menteri) Kerajaan Gowa (Poellinggomang, 32). Keduanya digabung menjadi kerajaan kembar "*Rua Karaeng na Se're Ata*" Dua Raja tetapi Satu Hamba/ Rakyat (Sagimund, 1992:136). Kerajaan kembar ini kemudian lazim disebut Kerajaan Makassar. Raja ini setidaknya telah membangun pondasi kebesaran Kemaharajaan Gowa yang kemudian diwarisi oleh raja setelahnya. Kerajaan Gowa semakin mengembangkan dunia kemaritimannya. Hal ini sebagai strategi untuk lebih mengembangkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan terkuat di jazirah Sulawesi ini. Kebijakan maritim Kerajaan Gowa dijalankan bersamaan dengan berlanjutnya berbagai upaya untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan yang berlangsung antara 1570 dan 1591 (Pelras, 2006: 157).

Awal abad XVII ini juga oleh Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan Raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin dan mangkubuminya sekaligus Raja Tallo, I Mallinggaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam Karaeng Matowaya telah berhasil menyebarkan Agama Islam disebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa setidaknya melalui dua cara yakni, dengan cara damai dan melalui peperangan (Sewang 2005: 111-113). Dengan didasari

perjanjian kerajaan-kerajaan terdahulu, “*bahwa barangsiapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan (tentang jalan yang baik itu) kepada raja-raja sekutunya*” (Mattulada, 1989:152). Dengan dasar ini kemudian Kerajaan Gowa menyampaikan ajakan memeluk Agama Islam ini oleh seluruh kerajaan-kerajaan tetangganya. Ajakan secara damai ini disambut dengan baik oleh Kerajaan Sawitto, Balannipa, Bantaeng dan Selayar (Sewang, 2005: 112).

Ajakan secara damai ini ternyata ditolak keras oleh Kerajaan-Kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan *Tellumpoccoe* (Mappangara, 2004: 474), yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Penolakan tersebut karena dianggap hanya sebagai upaya untuk atau siasat untuk menguasai mereka (Mattulada, 1989: 153), islamisasi ini sebagai motif politik semata oleh Kerajaan Gowa. Dalih penyebaran Agama Islam sebagai kelanjutan perang-perang masa lalu, yang sama sekali tidak mempunyai alasan keagamaan, melainkan tujuan-tujuan perebutan kekuasaan tunggal di Sulawesi Selatan semata-mata (Sewang, 2005: 114).

Akibat dari penolakan tersebut maka menjadi alasan bagi Kerajaan Gowa untuk melancarkan serangan melalui dua arah, yaitu: melalui arah barat ke daerah Sawitto dan Rappang dan menyusul dari arah selatan melalui Tanete dan Barru. Kerajaan Gowa akhirnya berhasil Kerajaan-Kerajaan *Tellumpoccoe* tersebut, Soppeng pada tahun 1609, disusul Wajo tahun 1610 dan kemudian terakhir Bone pada tahun 1611. Dengan masuknya Islam Kerajaan Bone maka seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah menerima Islam, kecuali daerah Tana Toraja (Poellingomang, 2004: 119). Penerimaan Islam bagi Kerajaan Bone memberikan arti tersendiri bagi Kerajaan Gowa, sebab untuk pertama kalinya Gowa dapat menguasai seluruh Kerajaan-kerajaan Bugis (Sewang, 2005: 119). Islamisasi melahirkan Gowa sebagai kerajaan superiordi Sulawesi Selatan pada awal abad XVII semakin tampak.

Takluknya Kerajaan Bone menandai berakhirnya proses islamisasi di kawasan ini. Kendali politik berada dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa. Setelah proses pengislaman ini, terciptalah kedamaian dan ketentraman dikalangan Kerajaan-kerajaan Makassar dan Bugis (Mattulada, 2011: 52).. Disamping letak Kerajaan Gowa dengan bandar Somba Opu nya yang strategis, Kerajaan Gowa giat menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, apalagi setelah takluknya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 maka peluang Gowa untuk berkembang semakin terbuka lebar. Ekspansi politik ke luar pulau Sulawesi semakin gencar dilakukan.

Sampai tahun 1660, daerah-daerah luar Sulawesi Selatan yang tunduk pada kekuasaan Gowa Tallo yakni Bima (1616), Sumbawa, Salaparang (Lombok), Pulau Laut, Kutai, dan Berau (1618), Buton, Muna, Banggai, Pulau-pulau Sula, Pulau-pulau Solor-Sandow (Flores), Sumba (1626), Gorontalo dan Manado (1634), Pulau-pulau Obi, Buru, Seram, Timor (1640), Pulau Aru dan Kei (1640), dan Australia Utara (1640) (Poellingomang, 2004: 95).

Kerajaan Gowa selanjutnya dibawah kepemimpinan I Manuntungi Sultan Malikussaid (Raja Gowa XV) bersama mangkubuminya I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Patingalloang. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain nusantara semakin erat seperti dengan Mataram, Aceh, Banten dan raja-raja di

Maluku. Selain itu kerja sama dan hubungan persahabatan dilakukan dengan negara-negara diluar Nusantara seperti dengan Gubernur Spanyol di Manila, Raja Muda Portugis di Goa (India), Presiden di Keling (Coromandel, India), Machante di Masulipatan (India), dengan Raja Inggris, Raja Portugis, Raja Kastilia (Spanyol) dan Mufti di Mekkah (Mattulada, menyusuri, 1989:71). Dilain sisi pada masa pemerintahannya persaingan dan benih-benih konflik dengan Belanda pun sudah mulai semakin memanas walaupun tidak terjadi perang terbuka dengan pihak Belanda. Namun, keadaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya perubahan besar yang terjadi di Jazirah Sulawesi Selatan ini. Bukan hanya perubahan politik tapi juga perubahan dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Kejayaan dan keunggulan Gowa berlanjut pada Raja selanjutnya, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin (Raja Gowa XVI). Beliau harus mengendalikan pemerintahan yang berjaya ini ditengah-tengah keadaan yang sungguh genting menghadapi ancaman-ancaman dari Belanda. Konflik yang terjadi antara Kerajaan Gowa dengan pihak VOC semakin terbuka lebar. Dua tahun setelah penobatannya yakni pada April 1655, angkatan armada Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinannya sendiri melakukan penyerangan kepada orang-orang Belanda yang menduduki Buton (Koro, 2006: 92)

Sulawesi Selatan Pasca Perang Makassar

Perang Makassar sebagai suatu momentum perubahan. Perubahan dari segala aspek, bukan hanya perubahan dari aspek politik namun juga sosial, budaya dan ekonomi. Perang yang berlangsung kurang lebih empat tahun lamanya, terhitung dari tahun 1666-1669 yang kemudian berakhir dengan Perjanjian *Bungaya*. Jika perang Makassar sebagai suatu proses maka Perjanjian *Bungaya* adalah akhir dan hasil dari proses itu. Suatu konsekuensi logis, bahwa dalam perang maka akan memunculkan pihak sebagai pemenang dan dilain sisi ada pihak yang kalah. Pihak yang menang akan menjadi penguasa baru dan yang kalah akan menjadi bawahan. Penguasa baru akan mewarnai zamannya dengan ciri tersendiri yang membedakan dengan ciri penguasa sebelumnya. Hal inilah kemudian yang terjadi di Jazirah Sulawesi Selatan atau kawasan Indonesia Timur umumnya. Kerajaan kembar Gowa-Tallo sebagai penguasa atasan dan superior dikawasan ini kini berakhir dan terganti oleh keunggulan Kerajaan Bone, Soppeng bersama dengan sekutunya VOC (Kompeni Belanda).

Tatanan baru telah tercipta dengan tampilnya dua kekuatan besar di kawasan ini, Kerajaan Bone dibawah ketokohan Latenritatta Arung Palakka dan VOC dengan tokoh utama Speelman. Setelah perang Makassar, setidaknya ada tiga kekuatan yang bersaing, baik secara diam-diam dan tersembunyi ataupun secara terang-terangan dan terbuka. Kekuatan yang dimaksud adalah, kekuatan kompeni Belanda (VOC), dibawah pimpinan Speelman, kekuatan sekutu Bone-Soppeng dibawah pimpinan Arung Palakka dan terakhir kekuatan sekutu Gowa-Wajo yang merasa tidak terikat oleh perjanjian *Bungaya* ini (Mattulada, 1998:, 225). Tiga kekuatan besar diatas saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Namun untuk kekuatan yang terakhir tersebut, Gowa-Wajo tidak menjadi kekuatan superior untuk selanjutnya walaupun dalam keadaan tertentu mereka tetap menjadi “duri dalam daging” bagi dua kekuasaan lainnya. Terlepas dari tiga

kekuatan yang saling menunjukkan keunggulannya. Secara nyata tahun 1674 perdamaian tercapai di kawasan ini (Andaya, 2013:191). Sulawesi Selatan berada dalam kendali terpusat dengan ketokohan Latenritatta Arung Palakka. Pada tahun 1670 secara politis, Arung Palakka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696 (Rickefs, 2010: 134).

Kerajaan Bone menjadi basis utama pengendalian kekuasaan di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, Gowa pun takluk dan kini beralih ketangan penguasa baru, yakni Kerajaan Bone. Secara politik Kerajaan Bone selanjutnya memegang hegemoni kekuasaan sejak berakhirnya Perang Makassar sampai awal abad XX, dimana pada tahun 1905, Kerajaan Bone takluk dalam perang melawan Belanda dengan tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri.

Penutup

Kerajaan Bone dalam kurun waktu abad XVI menjadi salah satu kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Sulawesi Selatan, hal tersebut dipertegas dengan luasnya daerah kekuasaan, kemudian didukung dengan letaknya yang strategis. Hal tersebut diraih sejak pemerintahan Raja Bone V, La Tenrisukki Mappajungnge yang memerintah pada tahun 1508-1535, Raja Bone VI La Ulio Bote'E pada tahun 1535-1560 serta Raja Bone VII, La Tenrirawe Bongkang'nge pada tahun 1560- 1578. Kerajaan Bone semakin menguatkan kedudukannya pada masa raja berikutnya La Tenrirawe Bongkang'nge. Pada masa ini pecah perang dengan Kerajaan Gowa yang dipimpin I Mario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (Raja Gowa X) dan saudaranya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (Raja Gowa XI). Perang yang berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun ini diakhiri dengan Perjanjian *Caleppa*.

Kerajaan Gowa sejak kepemimpinan raja ke IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu-Mapa'risi Kallonna, tercapai banyak kemajuan dalam lapangan politik, ekonomi dan kekuatan peperangan, termasuk pendirian benteng-benteng pertahanan di Pantai Makassar. Awal abad XVII ini juga oleh Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan Raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin dan mangkubuminya sekaligus Raja Tallo, I Mallingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam Karaeng Matowaya telah berhasil menyebarkan Agama Islam disebagian besar wilayah Sulawesi Selatan.

Pasca Perjanjian Bongaya, tiga kekuatan besar, yakni Bone, VOC dan Gowa saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Terlepas dari tiga kekuatan yang saling menunjukkan keunggulannya. Secara nyata tahun 1674 perdamaian tercapai di kawasan ini. Sulawesi Selatan berada dalam kendali terpusat dengan ketokohan Latenritatta Arung Palakka. Pada tahun 1670 secara politis, Arung Palakka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696. Kerajaan Bone menjadi basis utama pengendalian kekuasaan di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, Gowa pun takluk dan beralih ketangan penguasa baru, yakni Kerajaan Bone. Secara politik Kerajaan Bone selanjutnya memegang hegemoni kekuasaan sejak berakhirnya Perang Makassar sampai awal

abad XX, dimana pada tahun 1905, Kerajaan Bone takluk dalam perang melawan Belanda dengan tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Tak lupa, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Istorica terbitan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat dipublikasikan pada edisi September 2016.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad dkk.1981/1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme danKolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: DepDikBud.Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
- Ali, Andi Muhammad. 1969. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Dinas Kebudayaan Bone
- Andaya, Leonard Y. 2013. *Warisan Arung Palakka*. Makassar: Inninawa
- Gibson, Thomas. 2009. *Kekuasaan Raja,Syeikh, dan Ambtenaar*. Makassar: Inninawa
- Hafid, Abdul. 1989. *Sistem Pemerintahan Kerajaan Bone Abad Ke-17*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
- Koro, Nasaruddin. 2006. *Ayam Jantan Tanah Daeng*. Jakarta:Penerbit Ajuara
- Mappangara, Suriadi.2004. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai Tahun1905*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar:Hasanuddin University Press
- 2011. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar DalamSejarah*. Yogyakarta: Ombak
- M.D, Sagimun.1992. *Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Ufuk Timur*. Jakarta:Balai Pustaka
- Patunru, Abdurrazak Daeng dkk. 1989. *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
- Pelras, Christian.2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO
- Poelinggomang, Edward L. dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan (Jilid I)*. Makassar: Balitbangda
- Ricklefs, M.C.2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi
- Sewang, Ahmad .2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia